



LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

NOMOR 23 TAHUN 2017

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN PADA UNIT ORGANISASI DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH**

**SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,**

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pejabat/pegawai sebagai penanggungjawab dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada unit organisasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2017, dipandang perlu menetapkan kembali Pejabat Pembuat Komitmen pada masing-masing unit organisasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Unit Organisasi Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat

1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah, dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA UNIT ORGANISASI DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Lampiran I Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Unit Organisasi Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA UNIT ORGANISASI DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Nama/NIP/Jabatan Struktural	Jabatan Penugasan
1.	Angga Widita Amirul, S.E. NIP. 19840726 201012 1 001 Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Inspektorat
2.	Yasip Khasani, S.IP, M.M. NIP. 19741219 199703 1 005 Kepala Bagian Program dan Anggaran	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana
3.	Arso Hadi Wardono, S.E. NIP. 19821216 201012 1 001 Kepala Subbagian Pemantauan	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana
4.	Jhon Piter Halomoan Situmorang, Ak., M.Ak. NIP. 19670101 198703 1 001 Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana
5.	Ari Sulindra, S.T., M.T NIP. 19790125 200212 1 004 Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Biro Umum dan Keuangan
6.	Moch. Zaini, SAP NIP 19600520 198502 1 001 Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Biro Umum dan Keuangan

7.	Andi Susanto, S.STP., M.Sc. NIP. 19790513 199711 1 001 Kepala Bagian Hukum dan Humas	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian
8.	Selamet Budiharto, Ak. NIP. 19680223 198903 1 001 Kepala Bagian Sistem Informasi	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian
9.	Tjipto Prasetyo Nugroho, Ak. NIP. 19670517 198803 1 001 Kepala Bagian Kepegawaian	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian
10.	Imam Arumsyah, S.E. NIP. 19821125 201012 1 001 Kepala Seksi Jasa Konsultasi	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
11.	Agita Marelia Ulfa, S.H. NIP. 19780721 200502 2 001 Kepala Seksi Perencana dan Pengawas Konstruksi	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
12.	Erwin Sondang S, S.STP., M.Si. NIP. 19800614 199810 1 001 Kepala Subdirektorat Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
13.	Ketsia Aprilianny Laya, S.T.P NIP 19850416 201012 2 001 Kepala Seksi Pertahanan Keamanan dan Keadaan Khusus	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
14.	Jochanan Setyo Adhi Nugroho, S.E. NIP. 19840503 201012 1 001 Kepala Seksi Pengembangan Pelaku Usaha	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
15.	Deasy Rachmawati, S.E. NIP 19791231 201012 2 001 Kepala Seksi Bilateral	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
16.	Tito Sulisty, S.E. NIP. 19820208 201012 1 001 Kepala Seksi Perencanaan Pengadaan Pemerintah Daerah	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pengadaan

17.	Himawan Giri Dahlan, S.Sos NIP. 19820822 201012 1 001 Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pengadaan	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pengadaan
18.	Eko Rinaldo Octavianus, SE, ME NIP. 19691014 199603 1 001 Kepala Subdirektorat Riset dan Kontrak	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
19.	Drs. Dwi Satrianto NIP. 19651108 199703 1 001 Kepala Subdirektorat Pengelolaan Katalog	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
20.	Sugianto, S.T NIP. 19820408 201012 1 001 Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
21.	Donald Sutanto Panjaitan, S.T., M.SE., M.Sc. NIP. 19770515 200502 1 001 Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
22.	Ria Agustina Nasution, S.E., M.E. NIP. 19680829 199503 2 001 Kepala Subdirektorat Pengembangan Pengelola Pengadaan	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Pengembangan Profesi
23.	Januar Indra, ST NIP. 19770103 200502 1 003 Kepala Subdirektorat Standar Kompetensi dan Kelembagaan	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Pengembangan Profesi
24.	Ichwan Makmur Nasution, M.Sc. NIP. 19750625 200212 002 Kepala Subdirektorat Sumberdaya Pembelajaran	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Pelatihan Kompetensi
25.	Wisnu Setyo Wijoyo, S.T., M.M. NIP. 19690413 199903 1 008 Kepala Subdirektorat Program Pelatihan	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Pelatihan Kompetensi
26.	Muhammad Firdaus, S.E., M.M. NIP. 19770202 200501 1 004 Kepala Subdirektorat Sistem dan Sarana Sertifikasi	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Sertifikasi Profesi

27.	Miftah Irfaniah, S.Pd.I, M.Pd. NIP. 19821221 201012 2 001 Kepala Seksi Tata Kelola Sertifikasi	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Sertifikasi Profesi
28.	Ranto, SP NIP. 19771123 200212 1 005 Kepala Subdit Wilayah I Barat	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I
29.	Muhamad Dwi Sumanto, S.Sos NIP. 19870319 201012 1 001 Kepala Seksi Wilayah Bali, Nusa Tenggara & Pusat	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I
30.	Ir. Irawaty Imran, M.T. NIP. 19600518 199603 2 001 Kepala Subdit Wilayah II Timur	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II
31.	Mudjisantosa, S.E., M.M. NIP. 19680616 198901 1 001 Kepala Subdit Keterangan Ahli	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum

KEDUA : PPK yang lama tetap bertanggungjawab terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan sebelum dikeluarkannya Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 April 2017

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN,



SALUSRA WIDYA

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan; dan
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.